

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
Ketua Mahkamah Agung RI	139
PROLOG	vii
Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI	139
KATA PENGANTAR EDISI REVISI	xiii
SEKAPUR SIRIH	xv
DAFTAR ISI	xix

BAB 1 PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH 1

A. Pengertian Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	1
1. Pengertian Hukum Acara Ekonomi Syariah	1
2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	5
3. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	8
4. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	10
5. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	14
6. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	22
B. Sumber-Sumber Hukum Acara	25
1. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum	26
2. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama	26
3. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Agama	27

4. Sumber-sumber Lainnya.....	27
C. Asas-asas Umum dan Khusus Hukum Acara Peradilan Agama.....	30
1. Asas Umum Peradilan Agama.....	30
2. Asas Khusus Peradilan Agama.....	32
D. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara	36
1. Kekuasaan Relative	36
2. Kekuasaan Absolut.....	37
3. Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama.....	38

BAB 2 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR NONLITIGASI

	55
A. Pengertian Nonlitigasi	55
B. Dasar Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi	57
C. Jenis-jenis dan Bentuk Penyelesaian Nonlitigasi	60
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa	60
2. Arbitrase.....	78
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen	90
D. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara nonlitigasi	94
E. Contoh kasus penyelesaian nonlitigasi	98
1. Kasus Gadai Emas BRI Syariah	99
2. Kasus Sengketa antara Bank dan Nasabah di Bidang Sistem Pembayaran	102

BAB 3 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR LITIGASI

	105
A. Ketentuan Umum Beracara dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	105
1. Legal Standing	106
2. Para Pihak yang Memberikan Kuasa Kepada Orang Lain.....	107
3. Kuasa Menurut Hukum (<i>Legal Mandatory/Legal Representative</i>)	109
4. Perlindungan Konsumen	111
5. Gugatan <i>Class Action</i>	112
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana	115
1. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana	116

2.	Tahapan Penyelesaian Gugatan dengan Acara Sederhana.....	117
C.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa	125
1.	Mekanisme Pemeriksaan Perkara	126
2.	Waktu Penyelesaian Perkara	126
3.	Pemanggilan Para Pihak.....	127
4.	Upaya Damai	127
5.	Kualifikasi Hakim	127
6.	Pembuktian	128
7.	Kepastian tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama	128
8.	Tentang Tulisan Lafaz Bismillah	129
9.	Tentang Pertimbangan Hukum.....	129
10.	Tentang Acuan Hukum.....	129
11.	Pelaksanaan Putusan	129
D.	Wanprestasi dalam Perjanjian.....	130
1.	Ketentuan Umum	130
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi	130
3.	Tata Cara Menyatakan Debitur Wanprestasi.....	131
4.	Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi	132
5.	Pembelaan Debitur yang Dituntut Membayar Ganti Rugi.....	133
E.	Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeure).....	133
1.	Keadaan Memaksa Absolut atau Mutlak	134
2.	Keadaan Memaksa Relatif atau Nisbi	135
F.	Perbuatan Melawan Hukum	146
G.	Penyelesaian Sengketa Taflis/Pailit dalam Perkara Ekonomi Syariah.....	149
1.	Pengertian	149
2.	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Taflis/Pailit	151
3.	Dasar Hukum Taflis dalam Hukum Islam.....	153
4.	Proses Pernyataan Taflis/Pailit	153
5.	Jenis Kreditur dalam Kepailitan.....	155
6.	Pihak-pihak dalam Pengurusan Harta Pailit.....	156
7.	Akibat Kepailitan	156
BAB 4	UPAYA HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	181
A.	Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	181
1.	Pengertian Upaya Hukum.....	181

2.	Bentuk-bentuk Upaya Hukum	182
B.	Tata Cara Upaya Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah	186
1.	Tata Cara Upaya Hukum dalam Acara Sederhana	186
2.	Tata Cara Upaya Hukum dalam Acara Biasa	188
C.	Eksekusi Putusan dalam Sengketa Ekonomi Syariah	188
1.	Pengertian Eksekusi.....	188
2.	Sumber Hukum Eksekusi.....	189
3.	Asas-asas Eksekusi	190
4.	Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan	194
5.	Tata Cara Pelaksanaan Putusan.....	195
D.	Bentuk-bentuk Eksekusi dalam Sengketa Ekonomi Syariah	198
1.	Eksekusi Hak Tanggungan	198
2.	Eksekusi Putusan Arbitrase	223
3.	Eksekusi Jaminan Fidusia	226
4.	Eksekusi Hipotek Kapal Laut.....	229
5.	Hak Jaminan Resi Gudang.....	232
E.	Contoh Kasus Eksekusi Hak Tanggungan.....	241
1.	Kasus Posisi Pertama	241
2.	Kasus Posisi Kedua.....	252
3.	Kasus Posisi Ketiga.....	254
4.	Kasus Posisi Keempat	257
5.	Kasus Posisi Kelima	259
6.	Kasus Posisi Keenam	261
7.	Kasus Posisi Ketujuh.....	263
8.	Kasus Posisi Kedelapan	264
9.	Kasus Posisi Kesembilan	265

BAB 5	PENEMUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF	
	HUKUM EKONOMI SYARIAH	
		267
A.	Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum	
	Ekonomi Syariah.....	267
1.	Interpretasi dan Konstruksi Hukum sebagai Metode	
	Penemuan Hukum	267
2.	Hermeneutika sebagai Metode Pembaruan Hukum.....	276
3.	Metode Penemuan Hukum Islam	282
B.	Urgensi Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa	
	Ekonomi Syariah.....	285
C.	Aliran-aliran dalam Memahami Peranan Hukum	
	dalam Kegiatan Ekonomi	287

1.	Aliran Radikal	287
2.	Aliran Moderat	287
3.	Aliran Normatif	288
D.	Beberapa Aspek Pengubah Hukum.....	290
1.	Sosial Budaya sebagai Aspek Pengubah Hukum	290
2.	Politik sebagai Aspek Pengubah Hukum	301
3.	Ekonomi sebagai Aspek Pengubah Hukum	304
4.	Pendidikan sebagai Aspek Pengubah Hukum	307
5.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Aspek Pengubah Hukum	310
6.	Pengaruh Global dalam Bidang <i>Elektronic Commerce</i> sebagai Aspek Pengubah Hukum.....	313
7.	Supremasi Hukum sebagai Aspek Pengubah Hukum.....	314

BAB 6 SEJARAH LAHIRNYA PERATURAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

A.	PENGETAHUAN DASAR DAN PENYELESAIAN	317
A.	Pendahuluan	317
B.	Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung	
	Nomor 14 Tahun 2016	319
1.	Tahapan Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah	328
C.	Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	335
1.	Prospek ke Depan Ekonomi Syariah di Indonesia	335
2.	Peranan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	347

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN		353
TENTANG PENULIS		361

Menurut Winjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur cara bagaimana orang harus berbuat dalam mengajukan gugatan perdata di ruang pengadilan dan cara bagaimana pada pengadilan itu harus melaksanakan tindakan dan menerima, mempersik, dan mengadili dalam menyalankan hukum perdata materiil yang diajukan orang atas suatu subjek hukum. Menurut Winjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak di ruang pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak sesuatu sama